



# BAB I PENDAHULUAN.

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renja SKPD ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Bandung dan sekaligus menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2015 yang tercantum pada RKPD Kota Bandung Tahun 2015, diantaranya;

1. Isu Lingkungan Hidup;
2. Isu Infrastruktur;
3. Isu Kesehatan;
4. Isu Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Isu Sosial, Kemiskinan dan Pengangguran;
6. Isu Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
7. Isu Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Isu Perkembangan Teknologi dan Informasi;
9. Isu Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008, dan telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- r. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2013;
- s. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009;
- t. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
- v. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
- w. Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2015.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Maksud penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### **1.3.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu selama 1 (satu) tahun ke depan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renja BPPT Kota Bandung Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013**

Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta review terhadap RKPd.



**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi tujuan dan sasaran Renja SKPD serta uraian mengenai program dan kegiatan.

**BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung tahun 2015, yang disusun atas dasar dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (*stakeholder*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

**BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Berisi uraian tentang penjelasan kebutuhan dana tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 beserta sumber dana.

**BAB VI PENUTUP**

Berisi uraian kesimpulan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015.



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT TAHUN 2013**

### **2.1 GAMBARAN UMUM BPPT KOTA BANDUNG**

#### **2.1.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **A. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

##### **B. FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPPT mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program;
- b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

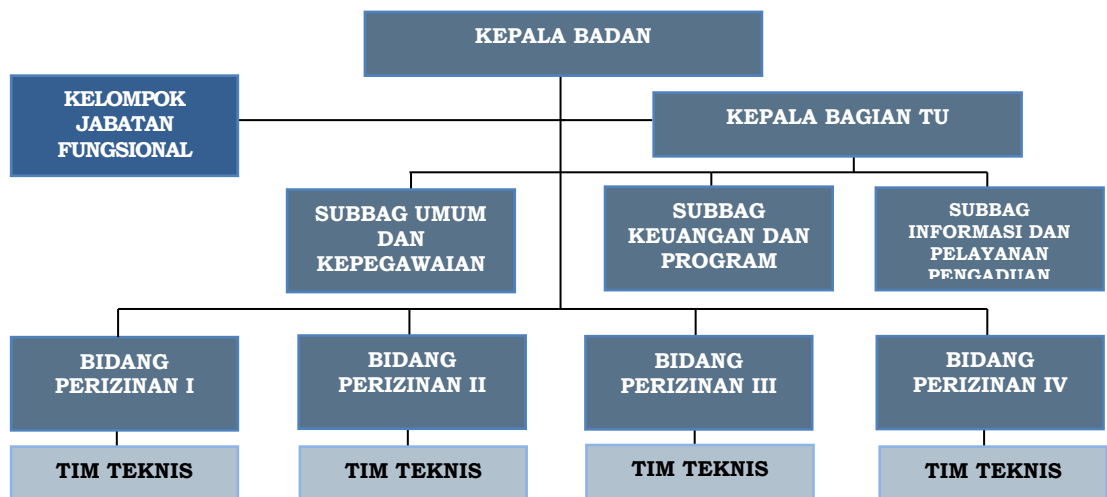


**C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, BPPT terdiri atas :

- a) Kepala Badan
- b) Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
  - c. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
- c) Bidang Perizinan I (Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata)
- d) Bidang Perizinan II (Bidang Penataan Ruang, Bangunan, Konstruksi, Pertanahan)
- e) Bidang Perizinan III (Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)
- f) Bidang Perizinan IV (Bidang Komunikasi dan Informasi serta Perhubungan)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Tim Teknis

Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut:







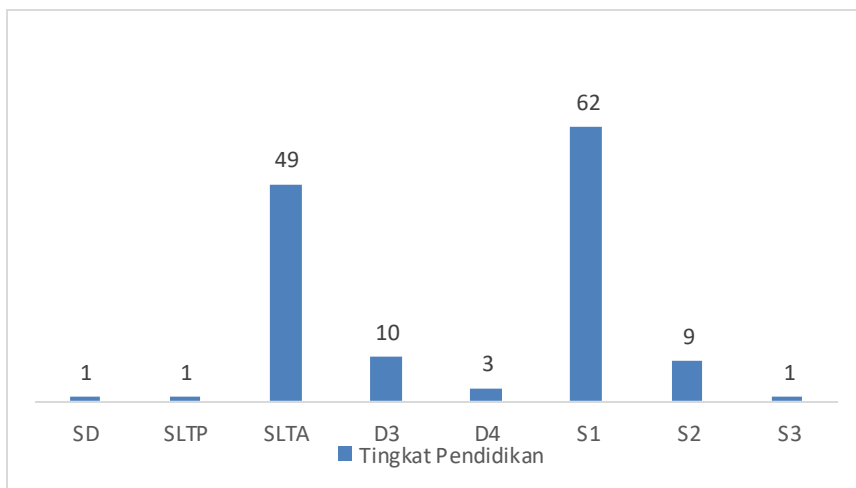
**2.1.2 SUMBER DAYA**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang, terdiri dari:

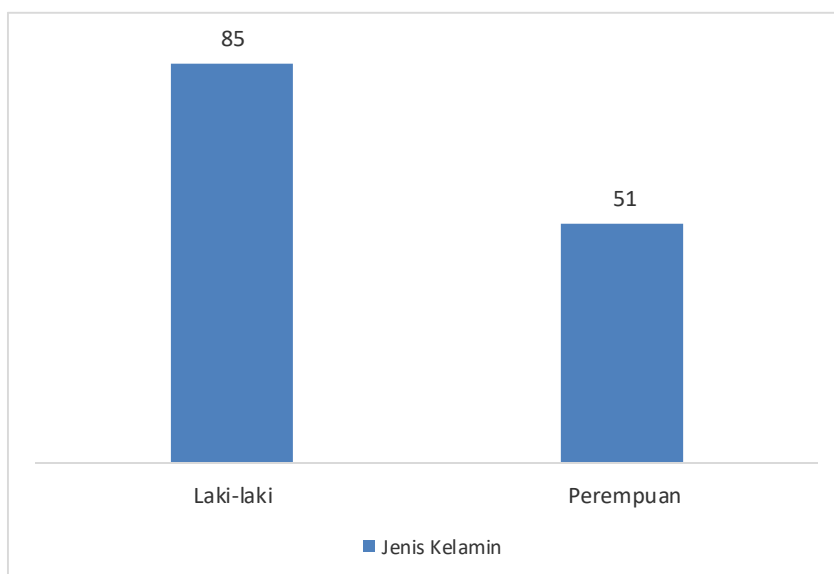
- a) Pejabat struktural : 9 orang
- b) Fungsional umum : 127 orang

Komposisi pegawai BPPT menurut data terakhir pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan tingkat pendidikan (orang)

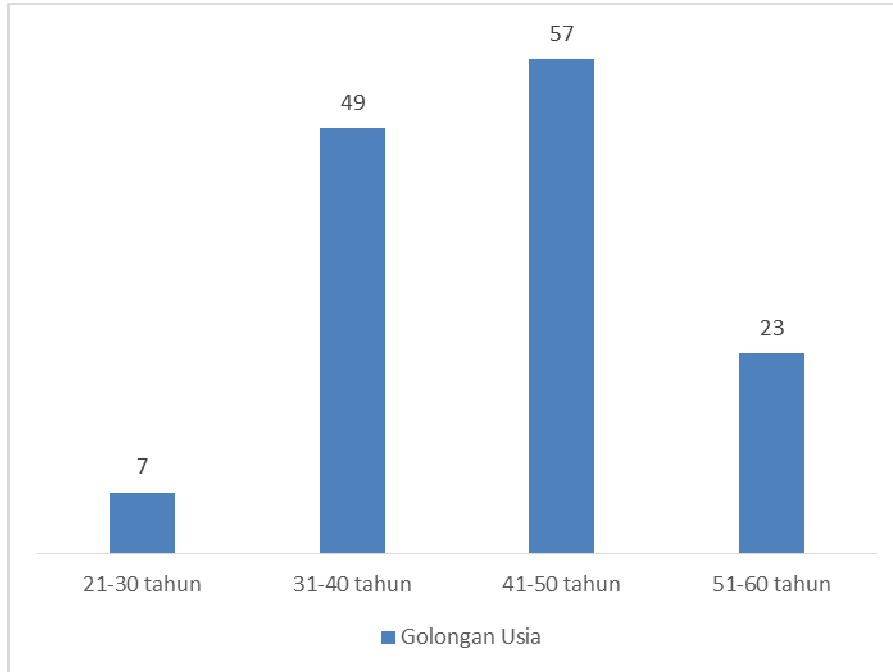


- b) Berdasarkan jenis kelamin (orang)

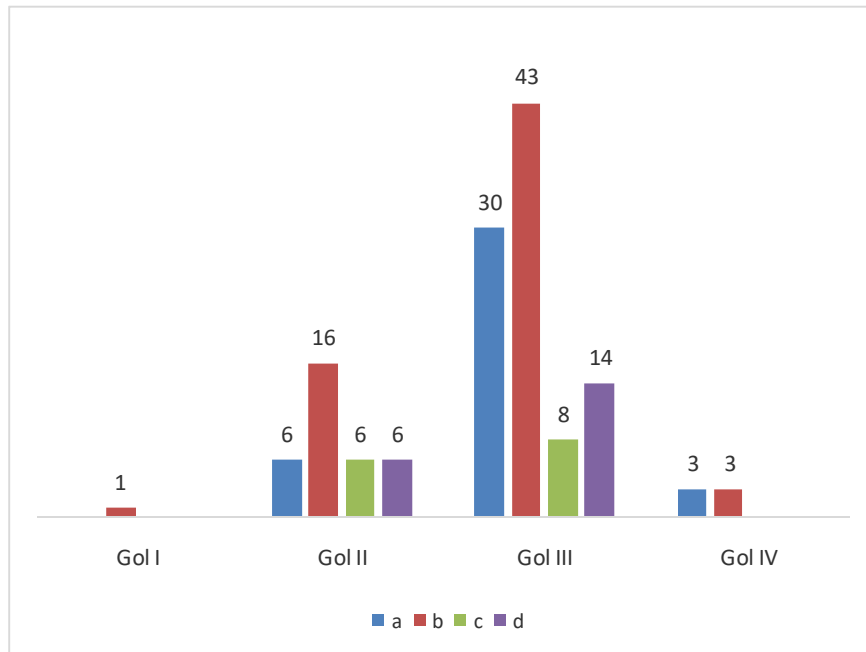




c) Berdasarkan golongan usia

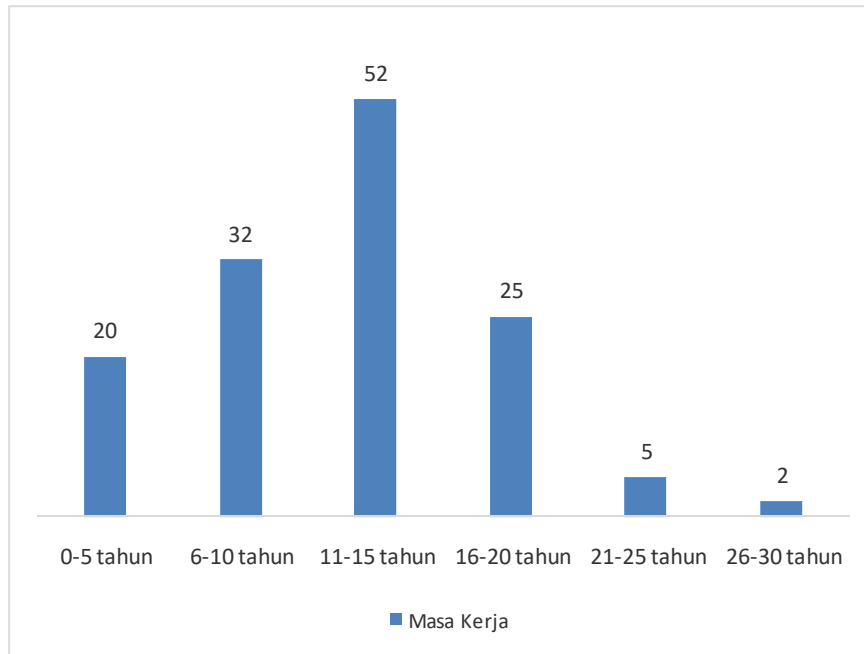


d) Berdasarkan kepangkatan





e) Berdasarkan masa kerja



### **2.1.3 GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

Pelayanan perizinan pada BPPT adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Pelayanan perizinan terbagi ke dalam empat bidang, sebagai berikut :

- 1) Bidang perizinan I, meliputi 7 jenis izin:
  1. Izin Gangguan (HO);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. Tanda Daftar Industri (TDI);
  6. Izin Usaha Industri (IUI); dan
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).



- 2) Bidang Perizinan II, meliputi 2 jenis izin:
  1. Izin Lokasi; dan
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3) Bidang Perizinan III, meliputi 10 jenis izin :
  1. Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Milik Sungai;
  2. Izin Pelaksanaan Konstruksi yang Mengubah Aliran dan atau Alur Sungai/Saluran;
  3. Izin Pemanfaatan Bekas Sungai;
  4. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
  5. Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
  6. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
  7. Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan Sejenisnya;
  8. Izin Penutupan Trotoar, Berm dan Saluran;
  9. Izin Penggalan Daerah Milik Jalan (Damija);
  10. Izin Pematangan Lahan;
- 4) Bidang perizinan IV, meliputi 4 jenis izin :
  1. Izin Trayek;
  2. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
  3. Izin Usaha Angkutan; dan
  4. Izin Penyelenggaraan Reklame.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap penerima layanan. Setiap pemohon yang akan melakukan



pengambilan izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;



9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.



Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variabel dengan total variabel yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang, dengan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25

**Tabel** : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik



Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

### **2.2.1 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013**

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, pada tahun 2013 ditetapkan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan urusan wajib dengan realisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>I</b>	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>572.650.000</b>	<b>479.019.800</b>	<b>Jumlah investor baru pertahun (500 perusahaan)</b>	<b>Jumlah investor baru pertahun (5.527 perusahaan)</b>
I.1	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP	106.050.000	76.275.000	Terselenggaranya koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP (1 kali)	Terselenggaranya pameran PPTSP (2 kali)
I.2	Penyelenggaraan Pameran PPTSP	466.600.000	402.744.800	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan selama 1 tahun





**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>II</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>207.950.000</b>	<b>200.625.000</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
II.1	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	207.950.000	200.625.000	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terselenggaranya penyebaran informasi pelayanan perizinan selama 1 tahun
<b>III</b>	<b>Program Pelayanan perizinan</b>	<b>1.278.400.000</b>	<b>1.145.090.770</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
III.1	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri serta Kebudayaan dan Pariwisata	445.750.000	435.583.800	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata (1 dokumen)
III.2	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan di Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi Serta Pertanahan	200.000.000	197.215.800	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan (1 dokumen)
III.3	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	160.000.000	156.357.400	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup (1 dokumen)
III.4	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika	150.000.000	145.724.470	Laporan hasil fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang perhubungan serta komunikasi dan informatika (1 dokumen)	Laporan hasil fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang perhubungan serta komunikasi dan informatika (1 dokumen)



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
III.5	Kajian dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perijinan	214.350.000	210.209.300	Standar Operasional Prosedur (2 dokumen)	Dokumen standar operasional prosedur perijinan (2 dokumen)
III.6	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP	108.300.000	-	Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP sebanyak 1 dokumen	-
<b>IV</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>992.000.000</b>	<b>110.870.000</b>	<b>Pelayanan perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi (100%)</b>	<b>Pelayanan perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi (100%)</b>
IV.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	992.000.000	110.870.000	Aplikasi Pelayanan Perijinan yang terpelihara dan dikembangkan (1 Aplikasi)	-
<b>V</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>155.000.000</b>	<b>140.014.400</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat (80%)</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat (95,04%)</b>
V.1	Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100.000.000	86.698.600	Laporan hasil fasilitasi pelayanan penanganan dan pengaduan masyarakat (1 dokumen)	Laporan hasil fasilitasi pelayanan penanganan dan pengaduan masyarakat (1 dokumen)
V.2	Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung	55.000.000	53.315.800	Aplikasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (1 Aplikasi)	Aplikasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (1 Aplikasi)
<b>VI</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>669.900.000</b>	<b>396.374.500</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
VI.1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	504.100.000	272.749.500	Rancangan Peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan (4 dokumen)	Rancangan peraturan daerah tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan (1 dokumen)
VI.2	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	165.800.000	123.625.000	Terlaksananya sosialisasi mengenai Perda dan Perwal Izin Gangguan (1 Tahun)	Terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan perizinan sebanyak 1 kali



Dari 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan urusan wajib yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2013, terdapat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 83,65% dan realisasi outcome (hasil) peningkatan jumlah investor baru pada tahun 2013 sebanyak 5.527 perusahaan dari target tahun 2013 sebanyak 500 perusahaan, melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pameran investasi;
2. Program pelayanan perizinan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,55% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya tingkat kinerja pelayanan perijinan satu pintu sebesar 137,48% dari target tahun 2013 sebesar 100% dan penataan penyelenggaraan reklame melalui perijinan sebesar 92,33% dari target tahun 2013 sebesar 75%, melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata; kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan dan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup.
3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,33% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya indeks kepuasan masyarakat sebesar 95,04% dari target tahun 2013 sebesar 80%, melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan penanganan pengaduan dan penelitian kepuasan masyarakat mengenai pelayanan perizinan di BPPT Kota Bandung.
4. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 52,56% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya tingkat kinerja pelayanan perijinan satu pintu sebesar 137,48% target tahun 2013 sebesar 100%, melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja



rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan .

Sementara itu masih terdapat program dan kegiatan yang tidak terealisasi, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada Program Pelayanan perizinan. Pada kegiatan tersebut terdapat proses perubahan, yang semula kegiatan Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Instansi Publik Kota Bandung berubah menjadi Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP, sehingga pihak penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang dalam proses lelang tidak dapat menyampaikan hasil pekerjaannya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan waktu yang telah ditentukan didalam proses lelang tersebut.
2. Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pada Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan didalam proses masa sanggah (lelang) ternyata ada salah satu pihak penyedia barang/jasa yang melakukan sanggahan secara administrasi sehingga harus dilakukan proses lelang ulang. Ternyata untuk melakukan proses lelang ulang dibutuhkan waktu 3 s.d 4 bulan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan untuk tahun 2013.

### **2.2.2 TINGKAT CAPAIAN RENSTRA BPPT TAHUN 2010-2013**

BPPT Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun sejak BPPT terbentuk, mengingat periode sebelumnya merupakan Renstra yang bersifat revisi sebagai tindak lanjut



dari transisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT periode 2010-2013 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		EKSISTING 2008	2012	2013	2013
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	75%	80%	95,04%
2.	Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu	30%	100%	100%	137,48%
3.	Jumlah investor baru pertahun	Jumlah investor 2500 perusahaan	500 perusahaan	500 perusahaan	5.527 perusahaan
4.	Pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT)	10%	100%	100%	100%
5.	Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan	5%	66%	75%	92,33%

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pelanggan (*7 button*) yang terdiri dari :

- a. Sangat Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);
- b. Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);
- c. Kurang Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);



- d. Sesuai (Survey Standar Biaya);
- e. Tidak Sesuai (Survey Standar Biaya);
- f. Sesuai (Survey Standar Waktu);
- g. Tidak Sesuai (Survey Standar Waktu).

Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Persepsi	Hasil Survey				Jumlah
			Bidang I	Bidang II	Bidang III	Bidang IV	
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	3.378	1.915	50	493	<b>5.836</b>
	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	20.443	3.687	250	975	<b>25.355</b>
	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1.424	146	8	49	<b>1.627</b>
2	Survey Standar Biaya	Sesuai	24.957	5.540	303	1.494	<b>32.294</b>
	Survey Standar Biaya	Tidak Sesuai	288	208	5	23	<b>524</b>
3	Survey Standar Waktu	Sesuai	23.168	5.415	289	1.441	<b>30.313</b>
	Survey Standar Waktu	Tidak Sesuai	2.077	333	19	76	<b>2.505</b>
<b>Jumlah Responden</b>			<b>25.245</b>	<b>5.748</b>	<b>308</b>	<b>1.517</b>	<b>32.818</b>

Capaian IKM tahun 2013 sebesar 95,04% diukur dari jumlah masyarakat yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan PPTSP di BPPT Kota Bandung pada indikator Survey Kepuasan Pembuatan Izin, dengan perhitungan sebagai berikut :



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

No	Indikator	Persepsi	Hasil Survey	%	Pengukuran IKM
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	5.836	17,78%	17,78%
2	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	25.355	77,26%	77,26%
3	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1.627	4,96%	-
<b>Jumlah</b>			<b>32.818</b>	<b>100%</b>	<b>95,04%</b>

2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diukur dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dari retribusi perizinan tahun yang bersangkutan dikalikan seratus persen (realisasi PAD/target PAD x 100%). Realisasi PAD dari retribusi perizinan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 78.046.510.284,00 atau sebesar 137,48% dari target sebesar Rp. 56.770.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	Jumlah liin	%
1	Retribusi Izin Gangguan (IG)/(ITU)	3.700.000.000	4.140.703.379	7.258	111,91%
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	53.000.000.000	73.818.256.905	5.808	139,28%
3	Retribusi Izin Trayek	70.000.000	87.550.000	578	125,07%
<b>Jumlah</b>		<b>56.770.000.000</b>	<b>78.046.510.284</b>	<b>13.644</b>	<b>137,48%</b>

3. Jumlah Investor Baru Pertahun

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 5527 perusahaan, merupakan jumlah ijin usaha baru yang terbit pada tahun 2013.

4. Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT)

Capaian pada Tahun 2013 yaitu sebesar 100%, dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi pada keseluruhan proses pelayanan perijinan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan proses penyerahan dokumen perijinan.



5. Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 sebesar 92,33%, diukur dengan cara membandingkan izin penyelenggaraan reklame yang terbit sebesar 5.540 izin dengan reklame yang terdata sebesar 6.000 dikalikan seratus persen.

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja BPPT secara lebih spesifik dan terukur.

Pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas salah satunya dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target organisasi :





**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**

No.	Uraian	Anggaran pada				Realisasi anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	250,832,000	150,000,000	161,084,650	155,000,000	247,473,260	142,379,505	160,695,275	140,014,000	98.66%	94.92%	99.76%	90.33%	-12%	-14%
2.	Program pelayanan perizinan	-	-	660,000,000	1,278,400,000	-	-	623,121,650	1,145,090,770	-	-	94.41%	89.57%	31%	28%
3.	Program penataan peraturan perundang-perundangan	-	-	599,757,490	669,900,000	-	-	573,015,425	396,374,500	-	-	95.54%	59.17%	4%	-10%
4.	Pogram peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	-	180,200,000	572,650,000	-	-	177,751,400	479,019,000	-	-	98.64%	83.65%	73%	56%
5.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	265,000,000	443,000,000	256,166,000	992,000,000	253,809,000	430,960,000	255,221,000	110,870,000	95.78%	97.28%	99.63%	11.18%	104%	-9%



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2013)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014	
					Target Renja SKPD (tahun 2013)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2013)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
<b>1</b>	<b>Usuran Wajib</b>									
<b>1.16</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
<b>1.16.1.16.01.19</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>75%</b>	<b>88,71%</b>	<b>80%</b>	<b>95,04%</b>	<b>119%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	2 kali	-	1 tahun	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu	4 kali	NA	NA	NA	NA	4 kali	4 kali	100%
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
<b>1.16.1.16.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP</b>	<b>CC</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%



### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPT. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPT. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

#### **POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Landasan hukum kelembagaan BPPT;
2. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
3. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
4. Adanya komitmen Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi BPPT serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;
5. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

#### **PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;
5. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama;



6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salahsatunya disebabkan oleh belum terdapatnya struktur khusus di BPPT Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum;
7. Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan;
8. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (Service Level Agreement) BPPT salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain;
9. Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;
10. Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :



### **POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung;
3. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
4. Pengembangan teknologi informasi.

### **PERMASALAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Lemahnya koordinasi;
4. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian di dinas terkait;
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.



4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan BPPT Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.
7. Kelembagaan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kerja perlu di evaluasi.



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT TAHUN 2013**

### **2.1 GAMBARAN UMUM BPPT KOTA BANDUNG**

#### **2.1.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **A. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

##### **B. FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPPT mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program;
- b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

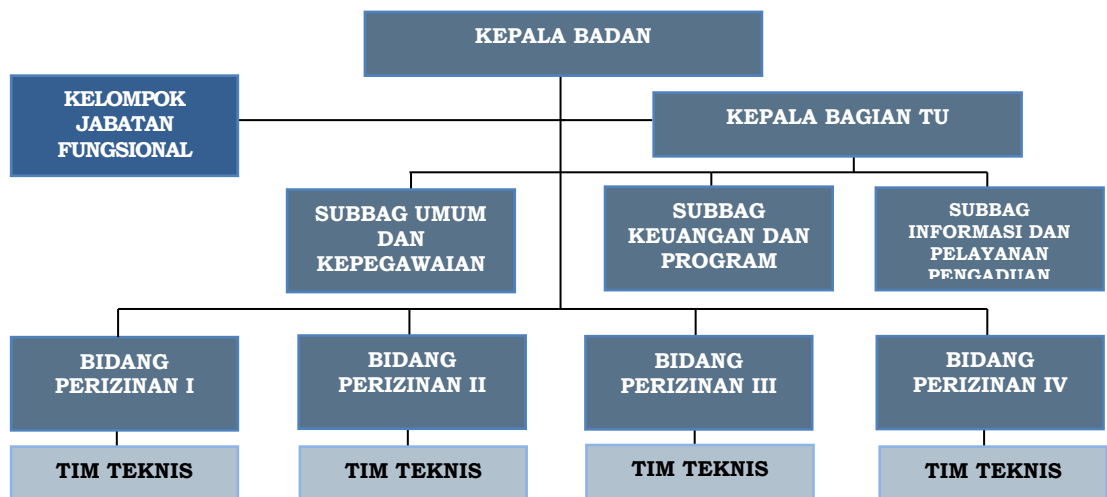


**C. SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, BPPT terdiri atas :

- a) Kepala Badan
- b) Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
  - c. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
- c) Bidang Perizinan I (Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata)
- d) Bidang Perizinan II (Bidang Penataan Ruang, Bangunan, Konstruksi, Pertanahan)
- e) Bidang Perizinan III (Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)
- f) Bidang Perizinan IV (Bidang Komunikasi dan Informasi serta Perhubungan)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Tim Teknis

Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut:







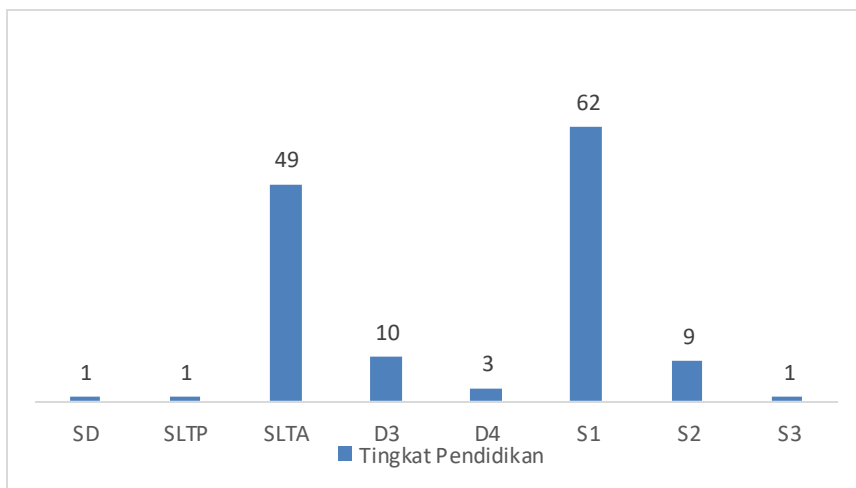
**2.1.2 SUMBER DAYA**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang, terdiri dari:

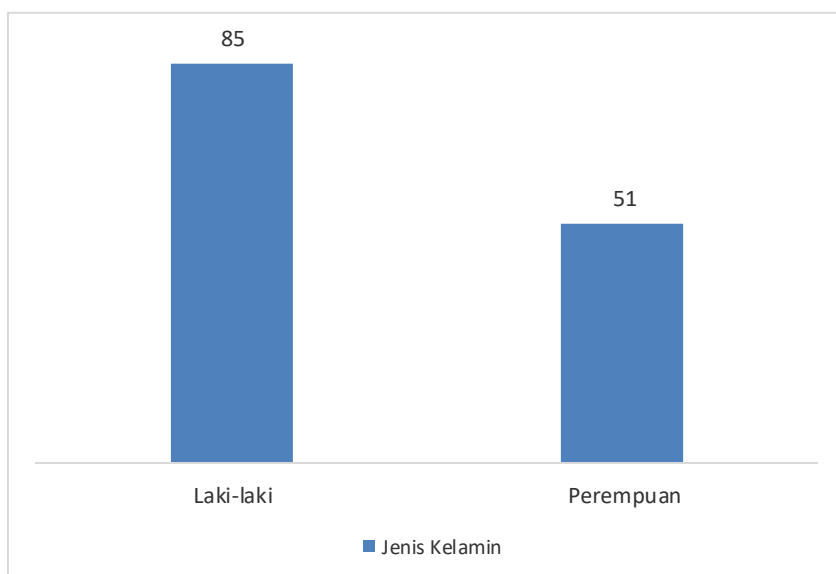
- a) Pejabat struktural : 9 orang
- b) Fungsional umum : 127 orang

Komposisi pegawai BPPT menurut data terakhir pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan tingkat pendidikan (orang)

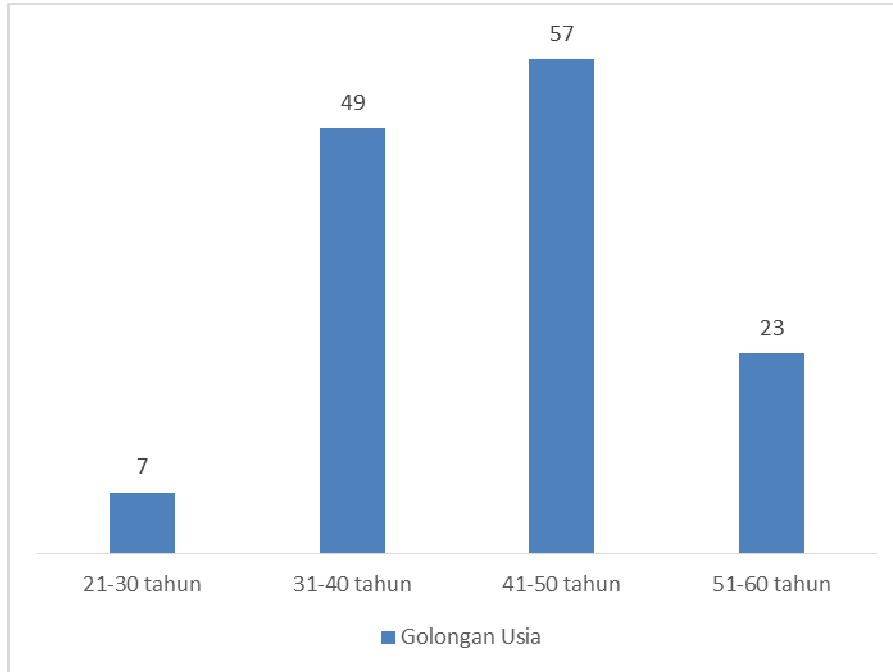


- b) Berdasarkan jenis kelamin (orang)

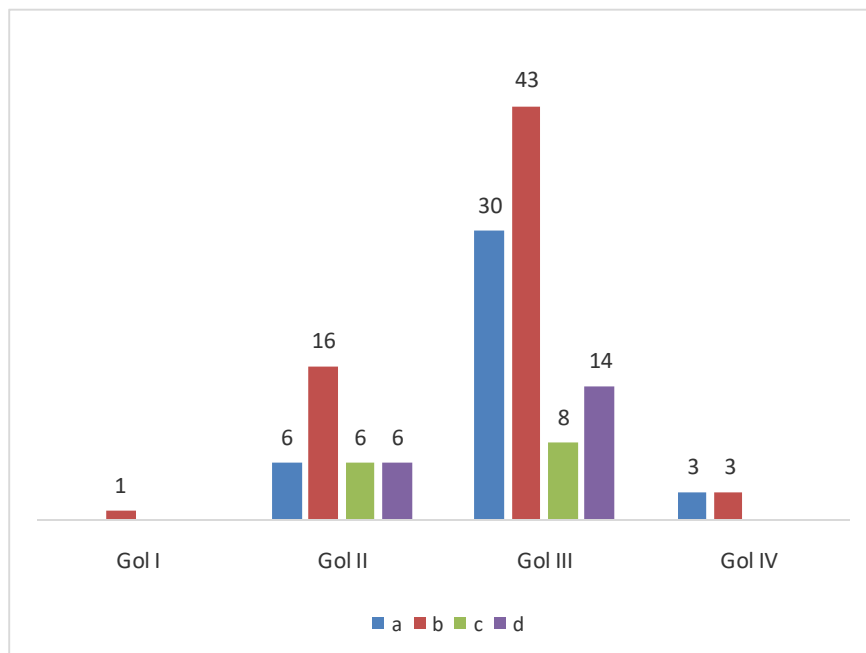




c) Berdasarkan golongan usia

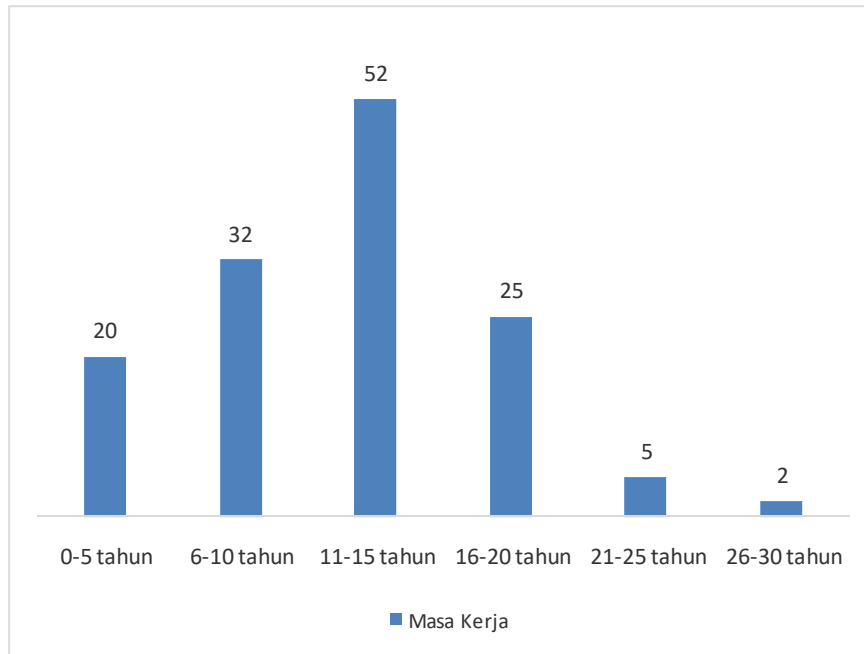


d) Berdasarkan kepangkatan





e) Berdasarkan masa kerja



### **2.1.3 GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

Pelayanan perizinan pada BPPT adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Pelayanan perizinan terbagi ke dalam empat bidang, sebagai berikut :

- 1) Bidang perizinan I, meliputi 7 jenis izin:
  1. Izin Gangguan (HO);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. Tanda Daftar Industri (TDI);
  6. Izin Usaha Industri (IUI); dan
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).



- 2) Bidang Perizinan II, meliputi 2 jenis izin:
  1. Izin Lokasi; dan
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3) Bidang Perizinan III, meliputi 14 jenis izin :
  1. Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan sejenisnya;
  2. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
  3. Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan sejenisnya.
  4. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran;
  5. Izin Pematangan Lahan/Tanah;
  6. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  7. Izin Penggalan Ruang Milik Jalan (Rumija);
  8. Izin Pengambilan Air Permukaan;
  9. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air;
  10. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai;
  11. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang dibangun oleh Masyarakat;
  12. Izin Pembangunan Lintasan yang berada di bawah/diatasnya;
  13. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada daerah Sempadan dan Saluran/Sungai; dan
  14. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya.
- 4) Bidang perizinan IV, meliputi 5 jenis izin :
  1. Izin Trayek;
  2. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
  3. Izin Jasa Titipan;
  4. Izin Usaha Angkutan; dan
  5. Izin Penyelenggaraan Reklame.



Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap penerima layanan. Setiap pemohon yang akan melakukan pengambilan izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;



6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.



Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variabel dengan total variabel yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang, dengan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : IKM Unit Pelayanan x 25

**Tabel** : Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik



Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

### **2.2.1 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013**

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, pada tahun 2013 ditetapkan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan urusan wajib dengan realisasi sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>I</b>	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>572.650.000</b>	<b>479.019.800</b>	<b>Jumlah investor baru pertahun (500 perusahaan)</b>	<b>Jumlah investor baru pertahun (5.527 perusahaan)</b>
I.1	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP	106.050.000	76.275.000	Terselenggaranya koordinasi Penyelenggaraan dan Pengembangan PPTSP (1 kali)	Terselenggaranya pameran PPTSP (2 kali)
I.2	Penyelenggaraan Pameran PPTSP	466.600.000	402.744.800	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan selama 1 tahun





**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
<b>II</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	<b>207.950.000</b>	<b>200.625.000</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
II.1	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan	207.950.000	200.625.000	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan selama 1 tahun	Terselenggaranya penyebaran informasi pelayanan perijinan selama 1 tahun
<b>III</b>	<b>Program Pelayanan perizinan</b>	<b>1.278.400.000</b>	<b>1.145.090.770</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
III.1	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Penanaman Modal, Perdagangan, Industri serta Kebudayaan dan Pariwisata	445.750.000	435.583.800	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata (1 dokumen)
III.2	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan di Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Konstruksi Serta Pertanahan	200.000.000	197.215.800	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan (1 dokumen)
III.3	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	160.000.000	156.357.400	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup (1 dokumen)	Laporan hasil pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup (1 dokumen)
III.4	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Bidang Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika	150.000.000	145.724.470	Laporan hasil fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang perhubungan serta komunikasi dan informatika (1 dokumen)	Laporan hasil fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang perhubungan serta komunikasi dan informatika (1 dokumen)



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
III.5	Kajian dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perijinan	214.350.000	210.209.300	Standar Operasional Prosedur (2 dokumen)	Dokumen standar operasional prosedur perijinan (2 dokumen)
III.6	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP	108.300.000	-	Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP sebanyak 1 dokumen	-
<b>IV</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>992.000.000</b>	<b>110.870.000</b>	<b>Pelayanan perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi (100%)</b>	<b>Pelayanan perijinan satu pintu berbasis teknologi informasi (100%)</b>
IV.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	992.000.000	110.870.000	Aplikasi Pelayanan Perijinan yang terpelihara dan dikembangkan (1 Aplikasi)	-
<b>V</b>	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>155.000.000</b>	<b>140.014.400</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat (80%)</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat (95,04%)</b>
V.1	Fasilitasi Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100.000.000	86.698.600	Laporan hasil fasilitasi pelayanan penanganan dan pengaduan masyarakat (1 dokumen)	Laporan hasil fasilitasi pelayanan penanganan dan pengaduan masyarakat (1 dokumen)
V.2	Penelitian Kepuasan Masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan di BPPT Kota Bandung	55.000.000	53.315.800	Aplikasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (1 Aplikasi)	Aplikasi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (1 Aplikasi)
<b>VI</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>669.900.000</b>	<b>396.374.500</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (100%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (75%)</b>	<b>Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu (137,48%) Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan (92,33%)</b>
VI.1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	504.100.000	272.749.500	Rancangan Peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan (4 dokumen)	Rancangan peraturan daerah tentang izin gangguan dan retribusi izin gangguan (1 dokumen)
VI.2	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	165.800.000	123.625.000	Terlaksananya sosialisasi mengenai Perda dan Perwal Izin Gangguan (1 Tahun)	Terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan perizinan sebanyak 1 kali



Dari 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan urusan wajib yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2013, terdapat 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 83,65% dan realisasi outcome (hasil) peningkatan jumlah investor baru pada tahun 2013 sebanyak 5.527 perusahaan dari target tahun 2013 sebanyak 500 perusahaan, melalui pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pameran investasi;
2. Program pelayanan perizinan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,55% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya tingkat kinerja pelayanan perijinan satu pintu sebesar 137,48% dari target tahun 2013 sebesar 100% dan penataan penyelenggaraan reklame melalui perijinan sebesar 92,33% dari target tahun 2013 sebesar 75%, melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan bidang penanaman modal, perdagangan, industri serta kebudayaan dan pariwisata; kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang penataan ruang, bangunan dan konstruksi serta pertanahan dan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perizinan di bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup.
3. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,33% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya indeks kepuasan masyarakat sebesar 95,04% dari target tahun 2013 sebesar 80%, melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelayanan penanganan pengaduan dan penelitian kepuasan masyarakat mengenai pelayanan perizinan di BPPT Kota Bandung.
4. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 52,56% dan realisasi outcome (hasil) tercapainya tingkat kinerja pelayanan perijinan satu pintu sebesar 137,48% target tahun 2013 sebesar 100%, melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja



rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan .

Sementara itu masih terdapat program dan kegiatan yang tidak terealisasi, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada Program Pelayanan perizinan. Pada kegiatan tersebut terdapat proses perubahan, yang semula kegiatan Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Instansi Publik Kota Bandung berubah menjadi Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP, sehingga pihak penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang dalam proses lelang tidak dapat menyampaikan hasil pekerjaannya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan waktu yang telah ditentukan didalam proses lelang tersebut.
2. Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pada Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan didalam proses masa sanggah (lelang) ternyata ada salah satu pihak penyedia barang/jasa yang melakukan sanggahan secara administrasi sehingga harus dilakukan proses lelang ulang. Ternyata untuk melakukan proses lelang ulang dibutuhkan waktu 3 s.d 4 bulan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan untuk tahun 2013.

### **2.2.2 TINGKAT CAPAIAN RENSTRA BPPT TAHUN 2010-2013**

BPPT Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun sejak BPPT terbentuk, mengingat periode sebelumnya merupakan Renstra yang bersifat revisi sebagai tindak lanjut



dari transisi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT periode 2010-2013 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		EKSISTING 2008	2012	2013	2013
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	75%	80%	95,04%
2.	Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu	30%	100%	100%	137,48%
3.	Jumlah investor baru pertahun	Jumlah investor 2500 perusahaan	500 perusahaan	500 perusahaan	5.527 perusahaan
4.	Pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT)	10%	100%	100%	100%
5.	Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan	5%	66%	75%	92,33%

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui survey kepuasan pelanggan (*7 button*) yang terdiri dari :

- a. Sangat Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);
- b. Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);
- c. Kurang Puas (Survey Kepuasan Pembuatan Izin);



- d. Sesuai (Survey Standar Biaya);
- e. Tidak Sesuai (Survey Standar Biaya);
- f. Sesuai (Survey Standar Waktu);
- g. Tidak Sesuai (Survey Standar Waktu).

Hasil survey kepuasan pelanggan tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Persepsi	Hasil Survey				Jumlah
			Bidang I	Bidang II	Bidang III	Bidang IV	
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	3.378	1.915	50	493	<b>5.836</b>
	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	20.443	3.687	250	975	<b>25.355</b>
	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1.424	146	8	49	<b>1.627</b>
2	Survey Standar Biaya	Sesuai	24.957	5.540	303	1.494	<b>32.294</b>
	Survey Standar Biaya	Tidak Sesuai	288	208	5	23	<b>524</b>
3	Survey Standar Waktu	Sesuai	23.168	5.415	289	1.441	<b>30.313</b>
	Survey Standar Waktu	Tidak Sesuai	2.077	333	19	76	<b>2.505</b>
<b>Jumlah Responden</b>			<b>25.245</b>	<b>5.748</b>	<b>308</b>	<b>1.517</b>	<b>32.818</b>

Capaian IKM tahun 2013 sebesar 95,04% diukur dari jumlah masyarakat yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap penyelenggaraan PPTSP di BPPT Kota Bandung pada indikator Survey Kepuasan Pembuatan Izin, dengan perhitungan sebagai berikut :



No	Indikator	Persepsi	Hasil Survey	%	Pengukuran IKM
1	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Sangat Puas	5.836	17,78%	17,78%
2	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Puas	25.355	77,26%	77,26%
3	Survey Kepuasan Pembuatan Izin	Kurang Puas	1.627	4,96%	-
<b>Jumlah</b>			<b>32.818</b>	<b>100%</b>	<b>95,04%</b>

2. Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diukur dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dari retribusi perizinan tahun yang bersangkutan dikalikan seratus persen (realisasi PAD/target PAD x 100%). Realisasi PAD dari retribusi perizinan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 78.046.510.284,00 atau sebesar 137,48% dari target sebesar Rp. 56.770.000.000,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	Jumlah liin	%
1	Retribusi Izin Gangguan (IG)/(ITU)	3.700.000.000	4.140.703.379	7.258	111,91%
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	53.000.000.000	73.818.256.905	5.808	139,28%
3	Retribusi Izin Trayek	70.000.000	87.550.000	578	125,07%
<b>Jumlah</b>		<b>56.770.000.000</b>	<b>78.046.510.284</b>	<b>13.644</b>	<b>137,48%</b>

3. Jumlah Investor Baru Pertahun

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 5527 perusahaan, merupakan jumlah ijin usaha baru yang terbit pada tahun 2013.

4. Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT)

Capaian pada Tahun 2013 yaitu sebesar 100%, dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi pada keseluruhan proses pelayanan perijinan dari mulai proses pendaftaran sampai dengan proses penyerahan dokumen perijinan.



5. Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2013 sebesar 92,33%, diukur dengan cara membandingkan izin penyelenggaraan reklame yang terbit sebesar 5.540 izin dengan reklame yang terdata sebesar 6.000 dikalikan seratus persen.

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja BPPT secara lebih spesifik dan terukur.

Pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas salah satunya dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target organisasi :





**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**

No.	Uraian	Anggaran pada				Realisasi anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	250,832,000	150,000,000	161,084,650	155,000,000	247,473,260	142,379,505	160,695,275	140,014,000	98.66%	94.92%	99.76%	90.33%	-12%	-14%
2.	Program pelayanan perizinan	-	-	660,000,000	1,278,400,000	-	-	623,121,650	1,145,090,770	-	-	94.41%	89.57%	31%	28%
3.	Program penataan peraturan perundang-perundangan	-	-	599,757,490	669,900,000	-	-	573,015,425	396,374,500	-	-	95.54%	59.17%	4%	-10%
4.	Pogram peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	-	180,200,000	572,650,000	-	-	177,751,400	479,019,000	-	-	98.64%	83.65%	73%	56%
5.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	265,000,000	443,000,000	256,166,000	992,000,000	253,809,000	430,960,000	255,221,000	110,870,000	95.78%	97.28%	99.63%	11.18%	104%	-9%



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2013)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2014	
					Target Renja SKPD (tahun 2013)	Realisasi Renja SKPD (tahun 2013)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2014	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib</b>									
<b>1.16</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
<b>1.16.1.16.01.19</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>75%</b>	<b>88,71%</b>	<b>80%</b>	<b>95,04%</b>	<b>119%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan	2 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
1.16.1.16.01.19.03	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran PPTSP	2 kali	-	1 tahun	-	-	2 kali	2 kali	100%
1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu	4 kali	NA	NA	NA	NA	4 kali	4 kali	100%
		Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu satu pintu	1 dokumen	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%
<b>1.16.1.16.01.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP</b>	<b>CC</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah</b>	<b>100%</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%



### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPT. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPT. Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

#### **POTENSI LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Landasan hukum kelembagaan BPPT;
2. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
3. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
4. Adanya komitmen Kepala Badan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi BPPT serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;
5. Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

#### **PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL**

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment;
5. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama;



6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salahsatunya disebabkan oleh belum terdapatnya struktur khusus di BPPT Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum;
7. Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan;
8. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (Service Level Agreement) BPPT salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain;
9. Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;
10. Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :



### **POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung;
3. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
4. Pengembangan teknologi informasi.

### **PERMASALAHAN LINGKUNGAN EKSTERNAL**

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Lemahnya koordinasi;
4. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian di dinas terkait;
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.



4. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan BPPT Kota Bandung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.
7. Kelembagaan/Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kerja perlu di evaluasi.



## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

**MISI :**

Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

**TUJUAN :** Meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perijinan

**SASARAN :**



1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan;
2. Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

**INDIKATOR KINERJA SASARAN :**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu;
3. Persentase Penurunan Pengaduan;
4. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI;
5. Rata-rata waktu penyelesaian izin
6. Nilai evaluasi AKIP;
7. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;
8. Persentase tertib administrasi barang/asset daerah.

**3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran dalam rencana strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Pada tahun 2015 BPPT Kota Bandung telah merumuskan 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) program urusan wajib dengan 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) program non urusan dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 9.707.765.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kota Bandung.

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan sebagaimana tabel berikut:





**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Urusan Wajib</b>								
<b>Penanaman Modal</b>								
<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>3.450.000.000</b>
Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang terkait dengan Penyelenggaraan PPTSP		2 dokumen	300.000.000			1 dokumen	350.000.000
Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perijinan yang terpelihara dan dikembangkan		1 aplikasi	350.000.000			1 aplikasi	200.000.000
Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan		1 dokumen	2.000.000.000			1 dokumen	2.000.000.000
Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan		2 kali	400.000.000			2 kali	500.000.000
Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	Terselenggaranya pameran pelayanan perijinan		2 kali	150.000.000			2 kali	250.000.000
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen	100.000.000			1 dokumen	150.000.000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Belanja Non Urusan</b>								
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administratif di lingkungan BPPT Kota Bandung</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	<b>-</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>3.483.000.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan		1 tahun	240.000.000			1 tahun	265.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor BPPT rapi dan bersih		1 tahun	315.000.000			1 tahun	350.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan kerja terpelihara		1 tahun	105.000.000			1 tahun	120.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor		1 tahun	330.000.000			1 tahun	350.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		1 tahun	330.000.000			1 tahun	350.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 tahun	85.000.000			1 tahun	950.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu		1 tahun	130.000.000			1 tahun	145.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1 tahun	685.000.000			1 tahun	755.000.000
Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	Keamanan kantor BPPT		1 tahun	180.000.000			1 tahun	198.000.000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>2.692.765.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>2.807.541.500</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas		3 paket	395.000.000			3 paket	500.000.000
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor		1 tahun	1.582.765.000			1 tahun	1.518.541.500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		1 paket	140.000.000			1 paket	154.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1 paket	575.000.000			1 paket	635.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>285.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>315.000.000</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas		1 paket	285.000.000			1 paket	315.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>590.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Meningkatnya kinerja aparatur</b>	<b>870.000.000</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll		1 tahun	300.000.000			1 tahun	550.000.000
Pembinaan Kinerja Aparatur	Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai		1 kali	290.000.000			1 kali	320.000.000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>190.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Tersedianya Laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>220.000.000</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja BPPT Tahun 2013		1 dokumen	55.000.000			1 dokumen	65.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2014		1 dokumen	55.000.000			1 dokumen	65.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan BPPT Tahun 2013		1 dokumen	80.000.000			1 dokumen	90.000.000
<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>115.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>130.000.000</b>
Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan		1 paket dokumen	115.000.000			1 paket dokumen	130.000.000
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Renstra dan Renja</b>	<b>BPPT Kota Bandung</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>80.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>	-	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>	<b>90.000.000</b>
Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	penyusunan Renstra dan Renja SKPD		2 dokumen	80.000.000			2 dokumen	90.000.000



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	BPPT Kota Bandung	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	55.000.000	APBD Kota Bandung	-	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	65.000.000
Penataan Arsip SKPD	Terlaksananya penataan arsip BPPT		1 tahun	55.000.000			1 tahun	65.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>9.707.765.000</b>				<b>11.430.541.500</b>





## **BAB IV**

# **INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD**

Sasaran strategis utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung adalah meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu dengan Indikator kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

### **4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :**

BPPT merupakan organisasi yang berorientasi pada pelayanan sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) menjadi tujuan utama (*Ultimate Goals*). Atas pertimbangan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Strategis yang perlu dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tata cara perhitungannya mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kondisi kinerja IKM pada awal periode tidak diketahui mengingat angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu masih diambil secara umum (1 variabel puas, kurang puas dan tidak puas) dan belum mengacu sesuai ketentuan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang terdiri dari 14 variabel utama. Diharapkan di tahun 2015 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat mencapai kinerja di 3.1 (baik) dari skala 4.



Disamping indikator kinerja sasaran strategis utama yang menggambarkan kinerja pelayanan, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi terkait dengan akuntabilitas organisasi dan tertib penatausahaan keuangan dan asset badan sebagai berikut :

- 1. Nilai evaluasi AKIP;**
- 2. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;**
- 3. Persentase tertib administrasi barang/asset daerah.**

Indikator kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja setiap tahun disajikan pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3.0 (Baik)	3,1 (Baik)	3.2 (Baik)	3.3 (Baik)	3.4 (Sangat baik)	3.4 (Sangat baik)
2	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	CC	B	B	A	A
3	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**Sinergitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung dengan  
program Badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung**

<b>NO.</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>INDIKATOR PRIORITAS</b>
1	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Program Pengendalian & Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pelanggaran pemanfaatan ruang dan lahan yang telah diproses sesuai kewenangan
2	Terlaksananya reformasi birokrasi	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kemudahan Berusaha
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Memiliki Sertifikasi ISO 9001
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Raperwal standard dan proses pelayanan SKPD/Unit Kerja
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Perencanaan Pembangunan	Evaluasi AKIP Kota Nilai dan Peningkatan LPP
3	Membangun perekonomian kota yang maju	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
4	Membangun perekonomian kota yang kokoh	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerimaan Bukan Pajak
		Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta)	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Program/ kegiatan dengan sumber pendanaan konvensional



Dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkelanjutan, diambil arah kebijakan pembangunan ekonomi kota dalam urusan Penanaman Modal, khususnya BPPT yaitu optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi dengan arah kebijakan penyederhanaan prosedur perijinan serta optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan perijinan.

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi tugas utama BPPT Kota Bandung adalah terlaksananya reformasi birokrasi dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya kemudahan berusaha. Disamping itu diperlukan peningkatan kualitas pelayanan berupa sertifikasi ISO dan peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja aparatur berupa Raperwal Standar prosedur pelayanan, evaluasi AKIP, Nilai pemeringkatan LPPD. Sejalan dengan reformasi birokrasi, prioritas pembangunan perekonomian kota yang maju dengan sasaran terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi menjadi program prioritas utama BPPT dalam memenuhi indeks kepuasan masyarakat dalam PPTSP.

BPPT sebagai pemberi produk dalam bentuk legalitas perijinan yang mempunyai fungsi kontrol dalam penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. Diharapkan pemanfaatan ruang dan lahan yang ada mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum.

Prioritas membangun perekonomian kota yang kokoh dengan sasaran peningkatan pendapatan asli daerah terkait dengan retribusi daerah, khususnya retribusi perijinan tertentu yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh



Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata, dalam hal ini ada tiga jenis ijin yang dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dikenakan biaya retribusi daerah yaitu ijin mendirikan bangunan, ijin gangguan dan ijin trayek. Program pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi proses layanan, pembayaran dan integrasi kemitraan dengan swasta.

Untuk mencapai indek kepuasan masyarakat atau indikator kinerja sasaran strategis utama BPPT membagi ke dalam empat perspektif yaitu :

### **1. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan**

Program kegiatan dirancang dengan pondasi pembelajaran dan pertumbuhan berupa melakukan penataan kembali fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaannya dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu terpadu melalui pembangunan infrastruktur sumber daya, guna mendukung proses layanan sebagai produk utama penunjang kepuasan masyarakat. Selain itu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dalam seluruh proses dan output organisasi dengan melibatkan seluruh pegawai dalam upaya memperbaiki layanan. Program yang masuk ke dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah :

- Program pelayanan administrasi perkantoran;
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- Program peningkatan disiplin aparatur; dan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

### **2. Perspektif Proses Bisnis Internal**

Program yang dilakukan BPPT yang masuk ke dalam perspektif ini adalah program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan



pelayanan perijinan terpadu. Perbaikan prosedur pelayanan dilihat dari aspek standar waktu, kemudahan persyaratan dan alur proses yang lebih efektif dan efisien .

- Standar waktu adalah Waktu yang ideal untuk menyelesaikan proses perijinan, dihitung dengan analisis *jobdesripsi*. Pemenuhan sarana-prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem dapat mempercepat proses pelayanan. Identifikasi alur yang menimbulkan banyak waktu, mencari solusi untuk percepatan dan uji solusi serta perbaikan berkelanjutan adalah cara yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran persfektif ini. Semakin singkat standar waktu yang ditempuh pencapaian *Key Performance Indicators (KPI)* semakin tinggi.
- Kemudahan persyaratan dilakukan dengan menghilangkan persyaratan yang dianggap kurang penting dan bisa digantikan. Contoh untuk mendirikan izin Bangunan awalnya harus membuat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terlebih dahulu namun sekarang cukup dengan Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya. Pendaftaran Izin juga dapat dilakukan dengan cara paralel yaitu sekali mendaftar dapat memohon 3 sampai 4 jenis izin sekaligus dengan 1 persyaratan yang sama, misalnya untuk Izin Gangguan (HO/IG) dapat digabung dengan Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, Izin Industri dan Kontruksi secara langsung dalam satu kali permohonan pendaftaran.
- Alur yang lebih efektif dan efisien, yaitu memangkas alur yang kurang berkontribusi, pengalihan Sumber Daya dan Sumber Daya Manusia ke tempat yang lebih produktif.



### 3. **Perspektif Finansial**

Program yang dilakukan BPPT yang masuk ke dalam perspektif ini adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pengembangan data/informasi serta program perencanaan pembangunan daerah. Finansial dilihat dari akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBD dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan. Seluruh laporan dan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu dan potensi retribusi yang dihitung dapat tercapai. Efektifitas, efisiensi dan ekonomis dalam belanja kegiatan dan program sebagai penggunaan anggaran.

### 4. **Perspektif Customer**

Dengan dipenuhinya aspek infrastruktur, standar waktu proses yang lebih cepat, kemudahan dalam melakukan perizinan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Selanjutnya untuk lebih fokus pada masyarakat pemohon izin, BPPT dapat mendekatkan diri pada pemohon perizinan dengan membuka mobil perizinan keliling (*mobile permit service*) di Kota Bandung. Sistem Online pun di lengkapi dengan fitur keluhan/pengaduan dan tanggapan dari masyarakat tentang proses pelayanan perizinan. Promosi secara berkala, bentuk *billboard*, pameran maupun sosialisasi. Pengembangan ke arah *e-payment* dan e-izin sehingga pemohon tidak lagi perlu datang dan menunggu antrian yang memerlukan waktu yang lama sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan konsep *Nobody contact*, yang diharapkan akan mengarah ke *zero complain*.





## BAB V

# DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana
	2015	2016	
1	2	3	4
<b>Penanaman Modal</b>			
<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>3.450.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan peraturan perundangan	300.000.000	350.000.000	
Kegiatan pengembangan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	350.000.000	200.000.000	
Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	2.000.000.000	2.000.000.000	
Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan	400.000.000	500.000.000	
Kegiatan penyelenggaraan pameran PPTSP	150.000.000	250.000.000	
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000	150.000.000	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>3.483.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	240.000.000	265.000.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	315.000.000	350.000.000	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	105.000.000	120.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	330.000.000	350.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	330.000.000	350.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.000.000	950.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000	145.000.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	685.000.000	755.000.000	
Penyediaan Jasa Pengamanan kantor	180.000.000	198.000.000	



**RENJA BPPT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana
	2015	2016	
1	2	3	4
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.692.765.000</b>	<b>2.807.541.500</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	395.000.000	500.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	1.582.765.000	1.518.541.500	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	140.000.000	154.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	575.000.000	635.000.000	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>285.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	285.000.000	315.000.000	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>590.000.000</b>	<b>870.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000	550.000.000	
Pembinaan Kinerja Aparatur	290.000.000	320.000.000	
<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>190.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	55.000.000	65.000.000	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	55.000.000	65.000.000	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	80.000.000	90.000.000	
<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>115.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Kegiatan pengumpulan ,updating dan analisis data informasi capaian target Kinerja Program dan Kegiatan	115.000.000	130.000.000	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>80.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Kegiatan penyusunan Renstra dan Renja SKPD	80.000.000	90.000.000	
<b>Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	<b>55.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>APBD Kota Bandung</b>
Penataan Arsip SKPD	55.000.000	65.000.000	
	<b>9.707.765.000</b>	<b>11.430.541.500</b>	





## BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung pada tahun 2015.

Akhirnya semoga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam menunjang tercapainya visi Kota Bandung **“Mewujudkan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”**

Bandung, 2014  
**KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU,**

**FORMAT I.H**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015**  
**KOTA BANDUNG**

Nama SKPD : <b>Badan Pelayanan Perizinan Terpadu</b>		Rencana Tahun 2015										Prakiraa
KODE REKENING	URAIAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>											
<b>1.16.1.16.01.01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,818,894,250</b>	<b>2,064,600,000</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.01.02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, listrik, paket pengiriman dan jasa pemasangan iklan	Jasa listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	540,000,000	250,000,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.08	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	Kebersihan bangunan gedung kantor	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	25,000,000	25,000,000	1 tahun
		Tersedianya belanja dekorasi	bunga artificial	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	51,769,250		
		Tersedianya jasa cleaning service		BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	350,000,000		
1.16.1.16.01.01.09	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	Peralatan kerja terpelihara	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	172,575,000	172,575,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Alat tulis kantor	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	319,375,000	319,375,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Barang cetakan	Barang cetakan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	433,775,000	433,775,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengendalian dokumen	Pengendalian dokumen	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun			
1.16.1.16.01.01.15	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan majalah	Surat kabar dan majalah	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	87,500,000	85,000,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	Makanan dan minuman harian pegawai	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	225,000,000	225,000,000	1 tahun
1.16.1.16.01.01.11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun			
1.16.1.16.01.01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 paket	1 paket	320,000,000	320,000,000	1 paket
1.16.1.16.01.01.20	Kegiatan penyediaan jasa pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	233,875,000	233,875,000	1 tahun
<b>1.16.1.16.01.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,052,252,103,079</b>	<b>7,970,755,000</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.02.05	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan bermotor roda empat	Kendaraan bermotor roda empat	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 unit	1 unit	429,450,000	429,450,000	1 paket
		Sepeda	Sepeda					10 unit	10 unit			
1.16.1.16.01.02.12	Kegiatan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	Alat-alat listrik dan elektronik, alat-alat instalasi air bersih, kelengkapan komputer dan peralatan jaringan komputer, peralatan dapur, rak arsip, filling kabinet, pesawat televisi, komputer/PC, notebook, printer, scanner, UPS/stabilizer, meja kerja, kursi kerja, dispenser dan shelter sepeda	Alat-alat listrik dan elektronik, alat-alat instalasi air bersih, kelengkapan komputer dan peralatan jaringan komputer, peralatan dapur, rak arsip, filling kabinet, pesawat televisi, komputer/PC, notebook, printer, scanner, UPS/stabilizer, meja kerja, kursi kerja, dispenser, shelter sepeda dan gorden	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	16 paket	19 paket	2,999,520,000	3,264,520,000	15 paket
1.16.1.16.01.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Bangunan gedung kantor terpelihara	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	730,975,000	226,000,000	1 tahun
1.16.1.16.01.02.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	626,600,000	701,600,000	1 tahun
		Kendaraan roda empat	Kendaraan roda empat					12 unit	11 unit			
		Kendaraan roda dua	Kendaraan roda dua					26 unit	26 unit			
1.16.1.16.01.02.42	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terehabilitasinya bangunan gedung kantor	Terehabilitasinya bangunan gedung kantor							573,597,603,079		1 paket
<b>1.16.1.16.01.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>205,750,000</b>	<b>205,750,000</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.03.02	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas harian warna khaki	Pakaian dinas harian warna khaki	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 paket	1 paket	205,750,000	205,750,000	1 paket
		Pakaian dinas harian warna bebas	Pakaian dinas harian warna bebas					1 paket	1 paket			
		Pakaian perlindungan masyarakat (LINMAS)	Pakaian perlindungan masyarakat (LINMAS)					1 paket	1 paket			1 paket
		Pakaian adat daerah	Pakaian adat daerah					1 paket	1 paket			1 paket
		Pakaian batik	Pakaian batik									2 paket
<b>1.16.1.16.01.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>642,500,000</b>	<b>692,500,000</b>	<b>100%</b>
1.16.1.16.01.05.01	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dll	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	230,000,000	280,000,000	1 tahun
1.16.1.16.01.05.04	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai	Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 kegiatan	1 kegiatan	412,500,000	412,500,000	1 kegiatan
<b>1.16.1.16.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	<b>Tingkat kewajaran laporan keuangan SKPD</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>WDP</b>	<b>263,500,000</b>	<b>263,500,000</b>	<b>WDP</b>
			<b>Penilaian LAKIP SKPD oleh inspektorat/Kemenpan</b>						<b>CC</b>			<b>CC</b>
1.16.1.16.01.06.01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013	Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	98,500,000	98,500,000	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.02	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semester I tahun 2014	Laporan keuangan semester I tahun 2014	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	60,000,000	60,000,000	1 dokumen
1.16.1.16.01.06.04	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan tahun 2013	Laporan keuangan tahun 2013	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	105,000,000	105,000,000	1 dokumen
<b>1.16.1.16.01.19</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perizinan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>3 (baik)</b>	<b>6,312,909,200</b>	<b>6,560,209,200</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Kota Bandung</b>
1.16.1.16.01.19.01	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Draft Raperwal tentang Izin Gangguan (HO)	Draft Raperwal tentang Izin Gangguan (HO)	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	438,000,000	438,000,000	1 dokumen
		Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP)	Dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP)					1 dokumen	1 dokumen			1 aplikasi

		Draft Raperwal tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)								-				1 dokumen
		Draft Raperwal tentang Izin Lokasi								-				2 kali
1.16.1.16.01.19.02	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perizinan terpadu yang dikembangkan	Aplikasi pelayanan perizinan terpadu yang dikembangkan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 aplikasi	1 aplikasi	1,434,109,200	1,434,109,200			2 kali
		Aplikasi ODS (One Day Service)	Aplikasi ODS (One Day Service)					1 aplikasi	1 aplikasi					1 dokumen
1.16.1.16.01.19.03	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	2,279,600,000	2,454,600,000			1 dokumen
1.16.1.16.01.19.04	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	1,296,200,000	1,368,500,000			1 tahun
1.16.1.16.01.19.05	Kegiatan penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	302,000,000	302,000,000			2 kali
1.16.1.16.01.19.06	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	563,000,000	563,000,000			1 dokumen
<b>1.06.1.16.01.15</b>	<b>Program pengembangan data informasi</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>168,800,000</b>	<b>168,800,000</b>			<b>100%</b>
<b>1.06.1.16.01.15.01</b>	Kegiatan pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 paket dokumen laporan	1 paket dokumen laporan	168,800,000	168,800,000			1 paket dokumen laporan
<b>1.06.1.16.01.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	<b>Dokumen perencanaan BPPT</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>			<b>2 dokumen</b>
1.06.1.16.01.21.16	Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD	Rencana kerja (Renja) tahun 2015	Rencana kerja (Renja) tahun 2015	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	55,000,000	55,000,000			1 dokumen
<b>1.24.1.16.01.15</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>41,100,000</b>	<b>41,100,000</b>			<b>100%</b>
1.24.1.16.01.15.08	Kegiatan penataan arsip SKPD (*)	Tertatanya arsip BPPT	Tertatanya arsip BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	41,100,000	41,100,000			1 tahun

KEPALA BADAN PELAYANAN PER

DR. H. A. MARYUN SASTRAK  
PEMBINA TK. 1  
NIP. 19610903 19910





n Maju Tahun 2016 Pagu Indikatif	Jenis Keg	SKPD Penanggung jawab
	a/b/c	
-17	-18	-19
<b>14,989,800,000</b>		
<b>1,675,000,000</b>	-	-
265,000,000	a	BPPT
350,000,000	a	BPPT
120,000,000	a	BPPT
350,000,000	a	BPPT
350,000,000	a	BPPT
95,000,000	a	BPPT
145,000,000	a	BPPT
755,000,000	a	BPPT
198,000,000	a	BPPT
<b>8,174,800,000</b>	-	-
500,000,000	a	BPPT
1,518,541,500	a	BPPT
154,000,000	a	
635,000,000	a	BPPT
315,000,000	-	-
315,000,000	a	BPPT
<b>870,000,000</b>	-	-
550,000,000	a	BPPT
320,000,000	a	BPPT
<b>220,000,000</b>	-	-
65,000,000	a	BPPT
65,000,000	a	BPPT
90,000,000	a	BPPT
<b>3,450,000,000</b>	-	-
350,000,000	a	BPPT

200,000,000	a	BPPPT
2,000,000,000	a	BPPPT
500,000,000	a	BPPPT
250,000,000	a	BPPPT
150,000,000	a	BPPPT
<b>130,000,000</b>	-	-
130,000,000	a	BPPPT
<b>90,000,000</b>	-	-
90,000,000	a	BPPPT
<b>65,000,000</b>	-	-
65,000,000	a	BPPPT

**IZINAN TERPADU,**

**USUMAH, MH**  
**[**  
**19 1 001**















1.16.1.16.01.19.02	Kegiatan penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi pelayanan perizinan terpadu yang dikembangkan	Aplikasi pelayanan perizinan terpadu yang dikembangkan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 aplikasi	1 aplikasi	963,700,000	963,700,000
		Aplikasi ODS (One Day Service)	Aplikasi ODS (One Day Service)					1 aplikasi	1 aplikasi		
1.16.1.16.01.19.03	Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	1,496,500,000	1,671,500,000
1.16.1.16.01.19.04	Kegiatan sosialisasi/publikasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan	Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	2 kali	253,200,000	253,200,000
		Terselenggaranya publikasi pelayanan perizinan						1 kali			
1.16.1.16.01.19.05	Kegiatan penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan	Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	247,200,000	247,200,000
1.16.1.16.01.19.06	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	62,000,000	62,000,000
<b>1.06.1.16.01.15</b>	<b>Program pengembangan data informasi</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>104,000,000</b>	<b>104,000,000</b>
1.06.1.16.01.15.01	Kegiatan pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 paket dokumen laporan	1 paket dokumen laporan	104,000,000	104,000,000
1.06.1.16.01.21	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT</b>	<b>Dokumen perencanaan BPPT</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
1.06.1.16.01.21.16	Kegiatan penyusunan renstra dan renja SKPD	Rencana kerja (Renja) tahun 2015	Rencana kerja (Renja) tahun 2015	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	50,000,000
1.24.1.16.01.15	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>71,000,000</b>	<b>71,000,000</b>
1.24.1.16.01.15.08	Kegiatan penataan arsip SKPD (*)	Tertatanya arsip BPPT	Tertatanya arsip BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	BPPT	1 tahun	1 tahun	71,000,000	71,000,000

KEPALA BADAN PELAYANAN

DR. H. A. MARYUN SAST  
PEMBINA  
NIP. 19610903 15







<b>Prakiraan Maju Tahun 2015</b>	<b>Jenis Keg</b>	<b>SKPD Penanggung jawab</b>
<b>Pagu Indikatif</b>	<b>a/b/c</b>	
<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-19</b>
<b>14,689,800,000</b>		
<b>2,400,000,000</b>	-	-
250,000,000	a	BPPT
305,000,000	a	BPPT
105,000,000	a	BPPT
330,000,000	a	BPPT
330,000,000	a	BPPT
85,000,000	a	BPPT
130,000,000	a	BPPT
685,000,000	a	BPPT
180,000,000	a	BPPT
<b>7,674,800,000</b>	-	-
7,674,800,000	a	BPPT
395,000,000	a	BPPT
1,482,765,000	a	BPPT
240,000,000	a	
575,000,000	a	BPPT
-	a	BPPT
<b>285,000,000</b>	-	-
285,000,000	a	BPPT
<b>590,000,000</b>	-	-
300,000,000	a	BPPT
290,000,000	a	BPPT
<b>190,000,000</b>	-	-
55,000,000	a	BPPT
55,000,000	a	BPPT
80,000,000	a	BPPT
<b>3,300,000,000</b>	-	-
350,000,000	a	BPPT

300,000,000	a	BPPT
2,250,000,000	a	BPPT
150,000,000	a	BPPT
150,000,000	a	BPPT
100,000,000	a	BPPT
<b>115,000,000</b>	-	-
115,000,000	a	BPPT
<b>80,000,000</b>	-	-
80,000,000	a	BPPT
<b>55,000,000</b>	-	-
55,000,000	a	BPPT

**PERIZINAN TERPADU,**

**TRAKUSUMAH, MH  
TK. I  
99109 1 001**



